



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
Tahun 1997 Nomor 8 Seri D No. Seri 5

**PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**NOMOR 7 TAHUN 1997**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PERKUMPULAN  
PETANI PEMAKAI AIR (P3A) KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN**

*Sistem Jaringan Dokumentasi &  
Informasi Hukum Kab. HSS T.A. 2003*

**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**BAGIAN HUKUM, ORGANISASI DAN TATALAKSANA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 1997

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PERKUMPULAN  
PETANI PEMAKAI AIR (P3A) KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4  
huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 14  
Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian  
Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerja  
an Umum kepada Daerah, penetapan pemben  
tukan dan atau pengembangan Perkumpulan  
Petani Pemakai Air menjadi tugas dan  
tanggung jawab Pemerintah Kabupaten  
Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;  
b. bahwa sebagai tindak lanjut dari keten  
tuan sebagaimana dimaksud huruf a di  
atas dan berdasarkan Pasal 3 Peraturan  
Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun  
1992 tentang Pembentukan dan Pembinaan  
Perkumpulan Petani Pemakai Air, Pedom  
an Pembentukan dan Pembinaan Perkum  
pulan Petani Pemakai Air harus diatur  
dengan Peraturan Daerah ;  
c. bahwa pedoman Pembentukan dan Pembina  
an Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)  
sebagaimana dimaksud huruf a dan b kon  
sideran ini perlu diatur dan ditetap  
kan dengan Peraturan Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820 ) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037 ) ;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046 ) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ( Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153 ) ;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi ( Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353 ) ;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ( Lembaran Negara Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II ( Lembaran Negara Nomor 3487 ) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Lembaga Sosial Desa Menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ;
11. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Pengairan ( Pengaturan Air dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi ) ;
12. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pembi naan Perkumpulan Petani Pemakai Air ;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 42/PRT/1989 tentang Tata Laksana Penyerahan Jaringan Irigasi Berikut Wewenang Pengurusannya Kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air ;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57/PRT/1991 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1992 tentang Iuran Pelayanan Irigasi ;



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 1979 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 1996 tentang Susunan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :  
a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- d. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah wadah untuk menampung kepentingan dan kegiatan petani secara bersama dalam mengelola air irigasi, dalam satu atau lebih petak tersier, Daerah Irigasi Pedesaan, Daerah Irigasi Pompa, Daerah Irigasi Tambak, Daerah Reklamasi Rawa pada khususnya serta usaha tani pada umumnya ;
- e. Forum Koordinasi P3A adalah wadah koordinasi dari beberapa P3A yang terbentuk atas dasar kebutuhan dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan program bersama ;
- f. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian ;
- g. Daerah Irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi ;
- h. Tata Pengairan adalah susunan dan letak sumber-sumber air atau bangunan pengairan menurut ketentuan-ketentuan teknik pembinaannya di suatu wilayah pengairan tertentu ;
- i. Pengelolaan Air Irigasi adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi termasuk pemeliharaan jaringannya ;
- j. Jaringan Irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya ;
- k. Jaringan Irigasi Pedesaan adalah jaringan yang pembangunan, pendayagunaan dan pemeliharaan jaringannya dilaksanakan oleh para petani dibawah pembinaan Pemerintah Desa dengan atau tanpa bantuan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah ;
- l. Jaringan Irigasi Pompa adalah irigasi yang sumber airnya berasal dari air tanah atau air permukaan yang dinaikkan dengan menggunakan pompa beserta perlengkapannya dengan tenaga penggerak ;



- m. Jaringan Irigasi Kecil adalah jaringan irigasi yang luas arealnya kurang dari 500 ha ;
- n. Daerah Reklamasi Rawa adalah suatu kesatuan wilayah yang memanfaatkan air dari satu jaringan reklamasi rawa, dalam rangka pemanfaatan rawa untuk kepentingan masyarakat luas ;
- o. Jaringan Reklamasi Rawa adalah keseluruhan saluran baik primer, sekunder maupun tersier dan bangunan yang merupakan satu kesatuan, beserta bangunan perlengkapannya yang diperlukan untuk pengaturan, pembangunan, pemberian, pembagian dan penggunaan air;
- p. Jaringan Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air di dalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi yang disebut sebagai kwarter dan saluran pembuang berikut seluruh bangunan turutan serta perlengkapannya termasuk jaringan irigasi pompa dan jaringan irigasi tambak yang areal pelayanannya disamakan dengan areal tersier ;
- q. Jaringan Irigasi Tambak adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi bagi usaha tambak mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya ;
- r. Pengelolaan air ditingkat usaha tani adalah usaha pendayagunaan air pada petak-petak tersier, jaringan irigasi pedesaan, irigasi pompa, irigasi tambak dan reklamasi rawa melalui pemanfaatan jaringan irigasi yang langsung berhubungan dengan petani dan areal pertaniannya, guna memenuhi kebutuhan optimum pertanian, termasuk pemeliharaan jaringannya ;
- s. Petak/Blok Tersier adalah bagian lahan dari suatu daerah irigasi atau daerah reklamasi rawa yang menerima air dari suatu pintu sadap tersier dan mendapat pelayanan dari jaringan tersier yang berkaitan ;
- t. Petak/Blok Kwarter adalah bagian dari lahan di dalam petak/blok tersier yang mendapat pelayanan air irigasi dari satu saluran kwarter ;



- u. Iuran Pelayanan Irigasi yang selanjutnya disingkat IPAIR adalah iuran yang dipungut dari petani pemakai air atas jasa pelayanan yang diberikan dibidang irigasi ;
- v. Iuran Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa, yang selanjutnya disingkat OP Jasira adalah iuran yang dipungut dari masyarakat pemakai air atas dasar pengambilan dan penggunaan air serta penggunaan jaringan reklamasi rawa tertentu ;
- w. Usaha Tani adalah usaha manusia memanfaatkan proses biologis tanaman dan hewan untuk mendapatkan hasil guna yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan.

## BAB II ASAS, SIFAT DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) P3A berazaskan Pancasila.
- (2) P3A merupakan perkumpulan yang bersifat sosial dengan maksud menuju ke arah hasil guna pengelolaan air dan jaringan dalam satu atau lebih petak tersier, daerah irigasi pedesaan, irigasi tambak dan irigasi pompa, daerah reklamasi rawa untuk meningkat kan kesejahteraan para anggotanya.
- (3) P3A bertujuan mendayagunakan potensi air irigasi yang tersedia secara tepat guna dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat tani.

## BAB III ORGANISASI

### Bagian Pertama Pembentukan

### Pasal 3

- (1) P3A dibentuk oleh dan untuk petani pemakai air, pada petak tersier, jaringan irigasi pompa, irigasi tambak, daerah irigasi pedesaan atau daerah irigasi rawa berdasarkan kesadaran dan kepentingan bersama.

- (2) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi proses pembentukan P3A.

#### Pasal 4

- (1) Pembentukan P3A harus memenuhi syarat :
- Mempunyai anggota yang terdiri dari pemilik, pemilik penggarap/penggarap/penyakap sawah, kolam ikan dan atau tambak ikan yang mendapat air dan irigasi, Badan Usaha yang mengusahakan lahan dengan menggunakan air irigasi dan pemakai air irigasi lainnya.
  - Mempunyai wilayah kerja berupa hamparan lahan yang mendapat air irigasi.
  - Mempunyai prasarana jaringan irigasi tersier, irigasi pedesaan, irigasi pompa, jaringan irigasi tambak dan jaringan reklamasi rawa.
- (2) Pembentukan P3A harus memperhatikan :
- Tingkat kesiapan masyarakat tani.
  - Keadaan sosial budaya dengan memperhatikan lembaga kepengurusan air tradisional yang ada pada daerah yang bersangkutan.

#### Pasal 5

- Petani pemakai air mengadakan musyawarah dan mufakat untuk membentuk P3A dan kepengurusannya.
- Pengurus P3A mengadakan rapat anggota untuk menyusun Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga P3A disusun sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 6

- Pembentukan P3A ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga mendapat perse tujuan dari Kepala Desa/Kelurahan dan Camat serta disahkan oleh Kepala Daerah.
- Pengurus P3A wajib mendaftarkan Anggaran Dasar tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.



- (3) Dengan terdaftarnya Anggaran Dasar P3A di Pengadilan Negeri setempat, maka P3A yang bersangkutan berstatus sebagai Badan Hukum berdasarkan Ordonansi tanggal 25 September 1939 tentang Perkumpulan Indonesia ( Staatdsblaad Tahun 1939 Nomor 570 ).
- (4) Sebagai Badan Hukum, P3A berhak melakukan hal-hal :
- a. Menerima aset berupa jaringan irigasi kecil dan jaringan irigasi tersier dari Pemerintah ;
  - b. Membuat ikatan kerja sama atau perjanjian dengan pihak lain yang bersifat ekonomi dalam rangka mencapai tujuan P3A ;
  - c. Menerima Hak Guna Air Irigasi dan mengatur pemanfaatannya sesuai pola dan tata tanam yang telah ditetapkan oleh Panitia Irigasi ;
  - d. Menerima bantuan baik berupa uang, sarana dan prasarana atau fasilitas fisik lainnya secara langsung dari lembaga/Instansi Pemerintahan atau swasta.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 7

Anggota P3A adalah semua masyarakat yang mendapat nikmat dan manfaat dari pelayanan air irigasi tersier, irigasi pedesaan, irigasi tambak, irigasi pompa dan irigasi rawa yang mencakup pemilik, penggarap, penggarap/penyakap/penyewa sawah, kolam ikan dan atau tambak yang mendapat air dari irigasi, Badan Usaha yang mengusahakan lahan dengan menggunakan air irigasi lainnya, baik untuk keperluan sosial maupun komersial.

### Pasal 8

- (1) Susunan organisasi P3A terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Pelaksana Teknis, Ketua-ketua petak/Blok Kwartir dan sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, Benda-



hara dan Pelaksana Teknis sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah setempat.

- (2) Ketua Petak/Blok Kwartar sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah seorang pemimpin dalam Blok Kwartar yang bersangkutan, yang dipilih/diangkat langsung oleh para anggota bloknya.
- (3) Dalam hal wilayah kerja P3A meliputi lebih dari satu Desa/Kelurahan, maka anggota Pengurus dipilih dari anggota P3A yang berdomisili pada desa yang memiliki wilayah kerja P3A terbesar, kecuali Wakil Ketua dipilih dari anggota-anggota yang berdomisili pada desa atau desa-desa yang memiliki wilayah kerja P3A lebih kecil.
- (4) Periode kepengurusan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar P3A.

#### Pasal 9

- (1) Rapat organisasi P3A terdiri dari :
  - a. Rapat Anggota ;
  - b. Rapat Pengurus.
- (2) Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam P3A.

#### Pasal 10

- (1) Dengan memperhatikan tata pengelolaan air pada jaringan yang meliputi dua wilayah kerja P3A atau lebih, dapat dibentuk Forum Koordinasi.
- (2) Forum Koordinasi P3A sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan untuk mengatur kepentingan bersama.
- (3) Forum koordinasi P3A dipimpin oleh seorang Ketua yang berfungsi sebagai koordinator dan dipilih oleh anggota forum yang terdiri dari ketua-ketua sebagai wakil masing-masing P3A.

#### Bagian Ketiga Tugas Wewenang

#### Pasal 11

Tugas dan wewenang P3A adalah sebagai berikut :

- a. Mengelola air dan jaringan irigasi di dalam petak tersier atau daerah irigasi pedesaan, daerah irigasi pompa, daerah irigasi tambak, daerah reklamasi rawa, agar dapat diusahakan untuk dimanfaatkan oleh para anggotanya secara tepat guna dan berhasil guna dalam memenuhi kebutuhan pertanian dengan memperhatikan unsur pemerataan diantara sesama anggota.
- b. membangun, merehabilitasi dan memelihara jaringan tersier, jaringan irigasi pedesaan, irigasi pompa, irigasi tambak dan reklamasi rawa sehingga jaringan tersebut dapat tetap terjaga kelangsungan fungsinya.
- c. Menentukan dan mengatur iuran dari para anggota yang berupa uang, hasil panen, atau tenaga untuk pendayagunaan air irigasi dan pemeliharaan jaringan tersier atau jaringan irigasi pedesaan, irigasi pompa, irigasi tambak dan reklamasi rawa serta usaha Pengembangan perkumpulan sebagai suatu organisasi.
- d. Membimbing dan mengawasi para anggotanya agar memenuhi semua peraturan yang ada hubungannya dengan pemakaian air yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, Pemerintah Daerah dan P3A.

## Pasal 12

- (1) Rapat Anggota mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
  - a. Membuat dan mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ;
  - b. Membentuk dan membubarkan pengurus ;
  - c. Mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus ;
  - d. Menentukan program kerja P3A.
- (2) Pengurus mempunyai wewenang melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan yang dite tapkan Rapat Anggota serta kebijaksanaan lainnya termasuk menyelesaikan sengketa antar anggota.



- (3) pelaksanaan teknis melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam hal pendayagunaan air irigasi serta pemeliharaan jaringan kwarter di wilayah bloknya.

Bagian Keempat  
Hak dan Kewajiban

Pasal 13

Hak dan Kewajiban anggota P3A adalah :

- a. Setiap anggota berhak mendapat pelayanan air irigasi sesuai dengan ketentuan pembagian air yang telah ditetapkan oleh Rapat Anggota.
- b. Setiap anggota wajib turut menjaga kelangsungan fungsi sarana dan prasarana jaringan irigasi, membayar iuran organisasi dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam AD/ART serta ketentuan lain yang ditetapkan oleh Rapat Anggota.
- c. Setiap anggota ikut menanggung biaya operasi dan pemeliharaan jaringan utama yang dikelola Pemerintah melalui IPAIR dan atau iuran operasi dan pemeliharaan jaringan irigas pada lokasi yang telah ditetapkan.

BAB IV  
WILAYAH KERJA P3A

Pasal 14

- (1) Wilayah kerja P3A ditetapkan berdasarkan prinsip tata pengairan (hidrologis) pada satu petak tersier, daerah irigasi pedesaan, daerah irigasi pompa, daerah irigasi tambak dan daerah reklamasi rawa.
- (2) Apabila terdapat satu atau beberapa petak tersier, daerah irigasi pedesaan, daerah irigasi pompa, daerah irigasi tambak dan daerah reklamasi rawa berukuran kecil dan memperoleh air dari sumber yang sama, maka petak tersier daerah irigasi pedesaan, daerah irigasi pompa, daerah irigasi tambak dan daerah irigasi rawa tersebut dapat digabungkan dalam satu wilayah kerja P3A.



- (3) Apabila terdapat satu petak tersier atau irigasi pedesaan atau irigasi pompa atau irigasi tambak atau reklamasi rawa yang luasnya melebihi satu batas wilayah desa, maka petak tersier atau daerah irigasi pedesaan atau irigasi pompa atau irigasi tambak atau reklamasi rawa tersebut dapat digabungkan menjadi satu P3A.

## BAB V HUBUNGAN KERJA

### Pasal 15

Untuk mewujudkan asas, sifat dan tujuannya, P3A melakukan hubungan kerja dengan :

- a. Instansi terkait ;
- b. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau disingkat LKMD ;
- c. P3A dan organisasi lainnya.

### Pasal 16

Hubungan kerja dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a Peraturan Daerah ini, bersifat fungsional dan konsultatif, mencakup hal-hal yang berkaitan dengan bidang organisasi, pembiayaan dan bidang keteknikan irigasi serta keteknikan pertanian.

### Pasal 17

- (1) Hubungan dengan LKMD sebagaimana dimaksud pasal 15 huruf b bersifat koordinasi dan saling mendukung dalam penyusunan rencana, pelaksanaan program kerja serta peningkatan dan pengembangan P3A
- (2) Hubungan koordinasi yang dilaksanakan oleh P3A dalam penyusunan rencana program meliputi :
  - a. Memperoleh masukan informasi dan pemikiran dari LKMD untuk perumusan usulan kegiatan ;
  - b. Memperoleh pertimbangan dari LKMD dalam pengambilan Keputusan tentang rencana kegiatan yang menyangkut Desa ;

- c. Memberikan informasi kepada LKMD tentang rencana kegiatan P3A ;
  - d. Memberikan informasi dan pertimbangan kepada LKMD dalam pembahasan rencana kegiatan LKMD yang menyangkut irigasi dan pengairan di desa.
- (3) Hubungan koordinasi yang dilaksanakan oleh P3A dalam pelaksanaan program kerja meliputi :
- a. Memberikan informasi kepada LKMD tentang pelaksanaan suatu kegiatan dalam rangka program kerja P3A ;
  - b. Memperoleh bantuan teknis dan administratif dari LKMD dalam menggerakkan anggota, menghimpun iuran dan sumbangan dana dari anggota P3A, memanfaatkan sumber daya lain yang tersedia di desa untuk kepentingan suatu kegiatan P3A serta mengatasi perselisihan dan pertentangan yang menyangkut masalah irigasi dan pengairan di desa ;
  - c. Membantu pelaksanaan program kerja LKMD yang berkaitan dengan bidang irigasi dan pengairan.
- (4) Hubungan koordinasi yang dilaksanakan oleh P3A dalam rangka peningkatan dan pengembangan P3A meliputi :
- a. Memperoleh masukan saran dan pemikiran dari LKMD untuk peningkatan dan pengembangan kemampuan P3A dibidang keorganisasian ;
  - b. Memperoleh dukungan dari LKMD dalam upaya meningkatkan kesadaran dan peran serta anggota P3A pada kegiatan P3A ;
  - c. Memperoleh bantuan teknis dan administratif dari LKMD guna memperlancar upaya pengembangan kemampuan P3A dibidang teknis dan keuangan.

## Pasal 18

Hubungan P3A dan organisasi lainnya sebagaimana dimaksud pasal 15 huruf c Peraturan Daerah ini, bersifat kerjasama baik dalam rangka mengelola air dan petak tersier, daerah irigasi pedesaan, daerah irigasi pompa, daerah irigasi tambak dan daerah reklamasi rawa untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi bersama, maupun dalam rangka pengembangan usahanya.



BAB VI  
PEMBINAAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan P3A merupakan tugas dan tanggung jawab semua Aparat Pembina mulai dari Daerah sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan secara berjenjang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditujukan untuk mendorong dan memfasilitasi proses pengembangan P3A menjadi organisasi yang mandiri dan mampu baik secara teknis, organisasi dan finansial melaksanakan pengelolaan air irigasi di wilayah kerjanya.

Pasal 20

- (1) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pasal 19 Peraturan Daerah ini meliputi 2 (dua) aspek, yaitu :
  - a. Pembinaan organisasi ;
  - b. Pembinaan Teknis.
- (2) Pembinaan organisasi P3A sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini dilakukan oleh :
  - a. Kepala Daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengembangan P3A ;
  - b. Camat melaksanakan koordinasi dan pengawasan atas pelaksanaan pembinaan dan pengembangan P3A ;
  - c. Kepala Desa/Kelurahan melaksanakan pembinaan dan pengembangan P3A sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya.
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b pasal ini, pelaksanaannya dibantu oleh Dinas terkait sebagai berikut :
  - a. Bidang keteknikkan irigasi oleh Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Daerah atau Cabang Dinas Pekerjaan Umum Hulu Sungai Selatan dengan tugas melaksanakan pembinaan bimbingan serta penyaluran kepada P3A dalam hal yang berhubungan dengan survey dan desain, konstruksi serta operasi dan pemeliharaan jaringan tersier, jaringan irigasi pedesaan, jaringan irigasi



pompa, jaringan irigasi tambak dan jaringan reklamasi rawa ;

- b. Bidang keteknikkan pertanian oleh Dinas dalam Lingkup Pertanian, dengan tugas melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada P3A dalam hal yang berhubungan dengan pemanfaatan air irigasi yang meliputi rekomendasi kebutuhan air, penerapan pola tanam dan teknik pemanfaatan air untuk pertanian dalam arti luas sesuai dengan kondisi setempat serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan para petani dalam bidang tersebut.

- (4) Untuk koordinasi pembinaan P3A dibentuk Tim Pembina P3A dan atau Panitia Irigasi Daerah dengan anggota terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya.

## Pasal 21

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dan 20 Peraturan Daerah ini mencakup :

1. Pada Tahapan sebelum Pembentukan P3A :
  - a. Inventarisasi jaringan irigasi ;
  - b. Inventarisasi jumlah petani pemakai air ;
  - c. Identifikasi lembaga kepengurusan air tradisional ;
  - d. Identifikasi batas-batas petak tersier ;
  - e. Penyuluhan.
2. Pada Tahapan Pengembangan P3A :

Peningkatan dan pengembangan P3A melalui kegiatan motivasi, penyuluhan, pelatihan, bimbingan teknis pengelolaan jaringan irigasi, pengelolaan organisasi dan menggerakkan partisipasi masyarakat.

## Pasal 22

Bentuk kegiatan, tata cara dan teknis pelaksanaan pembinaan P3A ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

## BAB VIII KEUANGAN

## Pasal 23

- (1) Segala keperluan keuangan P3A diusahakan oleh P3A yang bersang kutan.
- (2) Sumber keuangan P3A terdiri dari :
  - a. Iuran anggota ;
  - b. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat ;
  - c. Usaha-usaha lain yang sah menurut hukum.
- (3) P3A berwenang menentukan bentuk dan besarnya iuran anggota sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu secara teknis dan finansial dengan mempertimbangkan kemampuan, Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan pembiayaan pembangunan jaringan irigasi.
- (5) Apabila bantuan sebagaimana dimaksud ayat 4 Pasal ini tidak mencukupi, Pemerintah Daerah dapat mengajukan permintaan bantuan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dan atau Pemerintah Pusat.
- (6) P3A dapat melaksanakan usaha-usaha ekonomi diwilayah kerjanya dalam rangka mencapai tujuan P3A, sesuai sifat sosial organisasi P3A.

## Pasal 24

Pembiayaan untuk kegiatan pembinaan dan pengembangan P3A sebagai mana dimaksud dalam pasal 19 sampai dengan pasal 22 Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah dan dana lain yang sah berdasarkan ketentuan yang berlaku.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 25

P3A yang sudah dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan atau Kepala Daerah disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini secara bertahap.



Pasal 26

- (1) Lembaga kepengurusan air tradisional yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, diakui keberadaannya.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini secara bertahap disesuaikan dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana di tetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengun dangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di      Kandangan  
Pada tanggal      30 April 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN DAERAH TK II  
HULU SUNGAI SELATAN

Ketua,

Cap.

ttd.

S O E D A R N O

BUPATI KEPALA DAERAH TT II  
HULU SUNGAI SELATAN,

Cap.

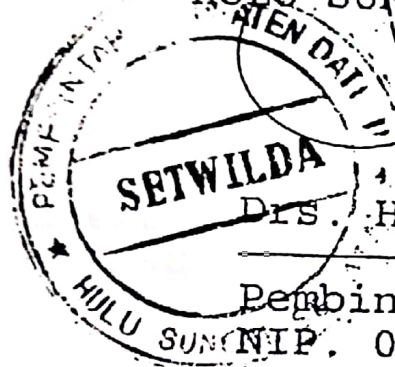
ttd

Drs. H. SAIDUL HUDARIE

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Kalimantan Selatan dengan  
Surat Keputusan  
Nomor 42/SK-1/KUM  
Tanggal 25 Juni 1997

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu  
Sungai Selatan  
Nomor 8 Tahun 1997 Seri D  
Tanggal 10 Juli 1997

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT II  
HULU SUNGAI SELATAN,



Dr. H. M. ARSYAD  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 045 675

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



ZAINI FAHRI  
NIP. 19690314 199503 1 002



P E N J E L A S A N  
A T A S  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 7 TAHUN 1997

TENTANG

~~PEBOMAN PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN~~ PERKUMPULAN PETANI  
PEMAKAI AIR (P3A) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
HULU SUNGAI SELATAN

I. PENJELASAN UMUM.

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, salah satu tugas Kepala Daerah dan DPRD dalam rangka mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sebagai suatu daerah otonom adalah membuat suatu Peraturan Daerah untuk menjabarkan peraturan perundang-undangan Pemerintah tingkat atas.
2. Bahwa sebagai realisasi Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air ( P3A ), perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.
3. Bahwa Pembentukan dan Pembinaan Petani Pemakai Air ( P3A ) mempunyai arti penting, mengingat:
  - a. Pengaturan pemakaian air oleh petani tidak ada yang kelebihan atau kekurangan.
  - b. Pemeliharaan irigasi diserahkan kepada petani melalui suatu Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), peranan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pemeliharaan jaringan primer dan sekunder sedangkan jaringan kwarter dan tersier oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air ( P3A ).

- c. Melalui Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) setiap anggota dipungut iuran yang besarnya ditetapkan oleh petani.
- d. Masyarakat petani bergotong-royong yang sebenarnya dapat dikerjakan oleh petani.
- e. Areal dibawah 500 ha wewenang petani untuk memeliharanya.

4. Bahwa sebagai realisasi peraturan perundang-undangan pemerintah tingkat atas dan untuk meningkatkan para petani mampu secara organisatoris, teknis dan finansial melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi wewenang serta dalam rangka meningkatkan swasembada pangan, maka perlu ditingkatkan fungsi, peranan dan status Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air ( P3A ) yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (4)

huruf a : Irigasi kecil maksudnya irigasi yang jaringannya dibawah 500 ha. Irigasi tersier maksudnya irigasi yang besar kecilnya tergantung medannya.

huruf b : Swasta maksudnya seperti Koperasi, PT yang mengelola HTI, Transmigrasi dan sejenisnya.

Pasal 7 s/d 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 ayat (3)

huruf a : Lingkup Dinas Pekerjaan Umum maksudnya Dinas Pekerjaan Umum Daerah dan Cabang Dinas Pekerjaan Umum Hulu Sungai Selatan.



ayat (4) : Instansi terkait maksudnya Bappeda Tingkat II Hulu Sungai Selatan, Dinas Pekerjaan Umum Daerah dan Cabang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Dinas Perikanan Daerah.

Pasal 21 s/d 27

: Cukup jelas.

----- 000 -----

Lampiran : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN  
Nomor : 7 Tahun 1997  
Tanggal : 10 Juli 1997

---

ANGGARAN DASAR  
PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR

P E M B U K A A N

1. Bahwa pembangunan dibidang pertanian dalam rangka memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi pertanian lainnya untuk meningkatkan pendapatan petani khususnya dan masyarakat pada umumnya, perlu didukung dan ditunjang oleh kesinambungan kegiatan tata guna air dan jaringan irigasi di tingkat usaha tani secara tepat guna dan berhasil guna.
2. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi ; pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan irigasi di tingkat usaha tani yaitu didalam petak tersier, daerah irigasi pedesaan, irigasi pompa dan irigasi tambak menjadi tugas dan tanggung jawab para perani pemanfaat air dan jaringan irigasi yang bersangkutan.
3. Bahwa untuk mewujudkan maksud diatas serta terjaganya kelestarian kondisi dan fungsi prasarana tersebut, para petani pemanfaat air dan jaringan irigasi telah sepakat untuk membentuk Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) sebagai wadah/organisasi yang bersifat sosial dan secara organisatoris, teknis dan finansial mampu melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya.
4. Bahwa wadah tersebut diharapkan dapat menampung kegiatan dan kepentingan bersama serta mempersatukan para petani atau kelompok tani guna memudahkan pembinaan dan menggerakkan partisipasinya dalam pembangunan pengairan dan pertanian khususnya serta pembangunan desa pada umumnya.



5. Bahwa dalam rapat / musyawarah yang dilaksanakan pada tanggal.....yang dihadiri oleh sebagian besar dari petani calon anggota perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) telah disepakati dibentuk Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) ..... dengan Anggaran Dasar sebagai berikut.

BAB I  
NAMA, WAKTU, TEMPAT KEDUDUKAN  
DAN WILAYAH KERJA

Bagian Pertama  
Nama

Pasal 1

Perkumpulan Petani Air ini, bernama .....

Bagian Kedua  
Waktu

Pasal 2

P3A ..... ini didirikan pada tanggal ..... untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Bagian Ketiga  
Tempat Kedudukan

Pasal 3

P3A ..... ini berkedudukan dan ber alamat kantor di..... Desa/Kelurahan .....Kecamatan.....Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Bagian Keempat  
Wilayah Kerja

Pasal 4

P3A ..... ini mempunyai wilayah kerja meliputi :  
- petak tersier ..... (nama petak tersier)  
dengan luas ..... hektar.  
- Daerah irigasi pedesaan ..... dengan luas  
..... hektar.  
- Daerah irigasi pompa ..... dengan luas  
..... hektar.  
- Daerah irigasi tambak ..... dengan luas  
..... hektar.  
Terletak di Desa ..... Kecamatan .....  
Desa ..... Kecamatan .....  
Desa ..... Kecamatan .....  
Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan  
Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan.

BAB II  
ASAS, SIFAT, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Pertama  
Asas

Pasal 5

P3A ..... ini berdasarkan Pancasila.

Bagian Kedua  
Sifat

Pasal 6

P3A ..... ini merupakan perkumpulan  
yang bersifat sosial.

Bagian Ketiga  
Maksud

Pasal 7

P3A ..... ini bermaksud melaksanakan  
pengelolaan air dan jaringan irigasi dalam satu atau



lebih petak tersier, dan atau daerah irigasi pedesaan, irigasi pompa dan irigasi tambak secara tepat guna dan berhasil guna untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota.

#### Bagian Keempat

##### Tujuan

#### Pasal 8

P3A ..... ini bertujuan mendayagunakan potensi air irigasi secara tepat guna dan berhasil guna yang tersedia kesejahteraan masyarakat tani.

#### BAB III

##### TUGAS

#### Pasal 9

P3A ..... ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengelola air dan jaringan irigasi di dalam petak tersier atau daerah irigasi pedesaan, irigasi pompa dan irigasi tambak agar dapat diusahakan untuk dimanfaatkan oleh para anggotanya secara tepat guna dan berhasil guna dalam memenuhi kebutuhan pertanian dengan memperhatikan unsur pemerataan diantara sesama anggota.
- b. Membangun, merehabilitasi dan memelihara jaringan tersier atau jaringan irigasi pedesaan, irigasi pompa dan irigasi tambak sehingga jaringan tersebut dapat tetap terjaga kelangsungannya.
- c. Menetapkan dan mengatur iuran dari para anggota yang berupa uang, hasil panen atau tenaga untuk pendayagunaan air irigasi dan pemeliharaan jaringan tersier atau jaringan irigasi pedesaan, irigasi pompa dan irigasi tambak serta usaha-usaha pengembangan perkumpulan sebagai organisasi.
- d. Membimbing dan mengawasi para anggota agar memenuhi semua peraturan yang ada hubungannya dengan pemakaian air yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan P3A.

- e. Menerima asset berupa jaringan irigasi kecil dari pemerintah dan mengelolanya secara bertanggung jawab.

## BAB IV ORGANISASI

### Bagian Pertama Susunan Organisasi

#### Pasal 10

Susunan Organisasi P3A ..... ini terdiri dari :

- a. Rapat Anggota ;
- b. Pengurus ;
- c. Anggota.

#### Bagian Kedua Rapat Anggota

#### Pasal 11

- (1) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan kekuasaan yang tertinggi dalam Organisasi P3A .....
- (2) Ketentuan ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### Bagian Ketiga Kepengurusan

#### Pasal 12

- (1) Pengurus P3A ..... ini dipilih dari dan oleh anggota dalam masa jabatan pengurus yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Kepala Desa/Kelurahan tidak dapat dipilih menjadi pengurus P3A .....

#### Pasal 13

Susunan pengurus P3A ..... terdiri dari :



- a. Ketua merangkap anggota ;
- b. Wakil Ketua merangkap Anggota ; (sesuai kebutuhan)
- c. Sekretaris merangkap anggota ;
- d. Bendahara merangkap anggota ;
- e. Pelaksana Teknis ( Ulu-ulu P3A/Pembantu Ulu-ulu P3A ) merangkap anggota ;
- f. Ketua-ketua Petak/Blok Kwartir merangkap anggota.

#### Pasal 14

Syarat-syarat untuk dipilih atau diangkat sebagai anggota pengurus adalah :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;
- c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa ;
- d. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 seperti G-30-S/PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya ;
- e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti ;
- f. Tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti, karena tindak pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ;
- g. Petani di petak tersier/lahan irigasi dan bertempat tinggal di Desa wilayah kerja P3A ..... ;
- h. Sekurang-kurangnya berumur 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 65 enam puluh lima) tahun ;
- i. Sehat jasmani dan rohani ;
- j. Sekurang-kurangnya berpendidikan Sekolah Dasar atau sederajat dan berkemampuan membaca dan menulis huruf latin ;
- k. Bersedia dan mampu mengelola organisasi.

#### Pasal 15

Tugas dan tanggung jawab pengurus adalah :

- a. Menyusun rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ;
- b. Membuat rencana/program kerja dan Anggaran Biaya untuk pemeliharaan, perbaikan dan perluasan jaringan irigasi di wilayah kerja organisasi ;
- c. Melaksanakan tugas-tugas P3A ..... ;
- d. Menyelenggarakan dan menghadiri rapat anggota, rapat pengurus, dan rapat-rapat lainnya baik secara rutin maupun insidental sesuai perkembangan dan kebutuhan ;
- e. Mengusahakan adanya dana tambahan diluar iuran baik yang berasal dari subsidi pemerintah dan pihak lainnya maupun atas usaha sendiri ;
- f. Membuat laporan tahunan perkembangan fisik jaringan di wilayah kerjanya ;
- g. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan untuk mendapat pengesahan dari rapat anggota yang bentuk dan susunannya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah tangga ;
- h. Membina, membimbing dan mengawasi anggota sesuai dengan Pasal 9 huruf d Anggaran Dasar ini.

#### Pasal 16

(1) Kewajiban Pengurus adalah :

- a. Melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Rapat Anggota ;
- b. Memimpin dan mengembangkan organisasi ;
- c. Memberikan pelayanan yang sama kepada setiap anggota dan mengusahakan terpeliharanya kerukunan diantara anggota serta menjauhkan segala hal atau tindakan yang bisa menimbulkan perselisihan ;
- d. Melaksanakan usaha/kegiatan yang sah guna meningkatkan sumber dana tambahan diluar iuran ;
- e. Menyelesaikan masalah-masalah yang timbul berkaitan dengan jaringan irigasi, pola tanam dan tata tanam serta organisasi ;
- f. Melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap anggota dalam pemanfaatan air dan jaringan irigasi ;



- g. Mewakili organisasi di dalam dan di luar pengadilan dalam hal terjadi tuntutan hukum, pengurus wajib lapor kepada Pembina ;
  - h. Menjelaskan rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga pada Rapat Anggota ;
  - i. Menyampaikan peraturan yang ada hubungannya dengan P3A, Pengairan dan Pertanian yang dikeluarkan oleh Pemerintah kepada seluruh anggota ;
  - j. Menyampaikan keputusan Rapat Anggota kepada pejabat yang berwenang ;
  - k. Mempertanggung jawabkan program kerja dan keuangan pada setiap awal tahun anggaran ;
  - l. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan kekeayaan kepada Rapat Anggaran.
- (2) Kewajiban masing-masing anggota pengurus diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### Pasal 17

Pengurus mempunyai hak :

- a. Memilih dan dipilih sebagai anggota pengurus ;
- b. Mendapatkan imbalan jasa atau jerih payah yang telah dicurahkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus ;
- c. Ketentuan yang termuat dalam Pasal ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### Pasal 18

Pengurus mempunyai wewenang :

- a. Melaksanakan pola tanam, tata tanam dan masa irigasi sesuai dengan pedoman dan ketentuan dari pejabat yang berwenang ;
- b. Menetapkan prioritas pembagian dan giliran penggunaan air irigasi sesuai dengan situasi dan kondisi setempat ;
- c. Mengadakan pungutan iuran guna pembiayaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang ada di dalam wilayah kerjanya sesuai dengan keputusan Rapat Anggota ;

- d. Mengadakan pungutan Iuran Pelayanan Irigasi (IPAIR) guna pembiayaan jaringan utama sesuai dengan keputusan rapat Badan Musyawarah IPAIR dan mengenakan sanksi kepada anggota yang tidak memenuhinya ;
- e. Melaksanakan masa pengeringan jaringan irigasi untuk setiap daerah irigasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ;
- f. Mengadakan hubungan/ikatan dengan pihak lain dalam mengembangkan usaha perkumpulan guna lebih meningkatkan sumber keuangan organisasi dan kesejahteraan anggota ;
- g. Mengadakan hubungan/ikatan dengan pihak lain, baik melaksanakan kontrak dan /atau mengontrakkan pekerjaan sipil pemeliharaan jaringan irigasi di wilayahnya.
- h. Menerima asset berupa jaringan irigasi kecil yang diserahkan pemerintah untuk dikelola dengan baik ;
- i. Mengadakan sanksi kepada anggota yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### Bagian Keempat Keanggotaan

#### Pasal 19

Anggota P3A ..... adalah semua petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pelayanan air irigasi di wilayah kerjanya, yang mencakup :

- a. Pemilik sawah ;
- b. Pemilik penggarap sawah ;
- c. Penggarap/penyakap ;
- d. Pemilik kolam ikan/tambak yang mendapat air irigasi ;
- e. Kepala Desa dan perangkat desa lainnya yang memperoleh tanah jabatan (bengkok/mengelola sawah) ;
- f. Badan usaha yang mengusahakan sawah dan atau kolam ikan ;
- g. Pemakai air irigasi lainnya.



## Pasal 20

Keanggotaan berakhir apabila :

- a. Tidak lagi memenuhi salah satu ketentuan Pasal 19;
- b. Meninggal dunia.

## Pasal 21

- (1) Setiap anggota berhak mendapatkan air irigasi sesuai dengan ketentuan pembagian air yang telah ditetapkan oleh pengurus dalam rapat anggota.
- (2) Setiap anggota wajib turut melestarikan jaringan irigasi, membayar iuran dan memenuhi serta mematuhi ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan oleh rapat anggota.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

## BAB V KEUANGAN

## Pasal 22

Sumber keuangan P3A ..... terdiri dari :

- a. Iuran Anggota ;
- b. Sumbangan atau bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat ;
- c. Usaha-usaha lain yang sah menurut hukum.

## Pasal 23

Segala yang dilakukan oleh P3A ..... dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, dibiayai oleh P3A .....

## Pasal 24

Pertanggung jawaban keuangan dan kekayaan organisasi diperiksa oleh Tim Vertivikasi yang ditunjuk oleh Rapat Anggota.

## BAB VI HUBUNGAN KERJA

### Pasal 25

Untuk mewujudkan asas, sifat dan tujuan P3A ..... melaksanakan hubungan kerja yang baik dan serasi dengan :

- a. Instansi terkait Pemerintah Desa/Kelurahan maupun instansi teknis di wilayah kerja organisasi ;
- b. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ;
- c. P3A dan organisasi lainnya ;

### Pasal 26

- (1) Hubungan kerja dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, bersifat fungsional dan konsultif, mencakup hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan bidang organisasi, pembiayaan dan bidang keteknikan irigasi serta keteknikan pertanian.
- (2) Apabila pengurus menghadapi kesulitan masalah dalam melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, wajib lapor dan atau meminta saran/nasihat dari tim Pembina P3A Tingkat Desa/Kelurahan sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (3) Petunjuk pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 27

- (1) Hubungan dengan LKMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b bersifat koordinatif dalam rangka penyusunan rencana, pelaksanaan program kerja, serta peningkatan pengembangan P3A.
- (2) Program dan kegiatan P3A ..... sebagai organisasi sosial di Desa dalam bidang pengairan dan pertanian, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari program dan kegiatan LKMD yang ada di wilayah kerja P3A .....



- (3) petunjuk pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 28

Hubungan P3A ..... dengan organisasi lainnya sebagai mana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c bersifat kerja sama dalam rangka pengelolaan air dan jaringan irigasi untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi bersama, maupun dalam rangka pengembangan usaha perkumpulan.

### BAB VII FORUM KOORDINASI

#### Pasal 29

- (1) P3A ..... dengan P3A lainnya yang berdekatan atau mempunyai kepentingan yang sama dalam satu sistem tata pengelo laan air dan jaringan irigasi dapat, membentuk Gabungan P3A yang merupakan Forum Koordinasi.
- (2) Gabungan P3A sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan untuk mengatur kepentingan bersama.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini akan ditetapkan kemudian bersama P3A terkait sesuai dengan petunjuk dari pejabat yang berwenang.

### BAB VIII PEMBINAAN

#### Pasal 30

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan dibidang organisasi,

teknis dan pembiayaan, P3A ..... berhak mendapatkan dan atau meminta pembinaan dan bimbingan dari Tim Pembina P3A, khususnya Tim Pembina P3A Tingkat Desa dan Tingkat Kecamatan.

- (2) Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

## BAB IX PEMBUBARAN

### Pasal 31

- (1) Pembubaran P3A ..... dapat dilaksanakan oleh Rapat Anggota setelah berkonsultasi dan disetujui oleh Tim Pembina P3A.
- (2) Ketentuan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

## BAB X PENUTUP

### Pasal 32

Perubahan Anggaran Dasar ini hanya dapat dilakukan oleh Rapat Anggota sesuai dengan ketentuan yang akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

### Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini sepanjang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Anggaran Dasar ini.



Pasal 34

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal pengesahan oleh Pejabat yang berwenang.

....., ..... 19....

PENGURUS P3A .....  
Ketua,

.....

Sekretaris,

.....

MENGETAHUI/MENYETUJUI

1. Kepala Desa/Kelurahan .....
- .....
2. Kepala Desa/Kelurahan .....
- .....
3. Dst.  
Camat .....
- .....

DISAHKAN OLEH :  
Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
Hulu Sungai Selatan

.....

Dengan Surat Keputusan Nomor .... Tanggal .....  
tentang.....

# ANGGARAN RUMAH TANGGA P3A .....

## BAB I RAPAT ANGGOTA

### Pasal 1

- (1) Rapat Anggota dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota.
- (2) Rapat anggota diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun menjelang musim hujan (MH) dan musim kemarau (MK) dan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (3) Penyelenggaraan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilaksanakan atas :
  - a. Prakarsa Pengurus ;
  - b. Prakarsa/saran Tim Pembina P3A ;
  - c. Permohonan/usul dari 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah anggota.

### Pasal 2

- (1) Rapat Anggota dipimpin oleh Ketua dan apabila Ketua berhalangan, Rapat Anggota dipimpin oleh Wakil Ketua.
- (2) Tiap anggota mempunyai satu suara dalam Rapat Anggota.

### Pasal 3

- (1) Rapat Anggota mempunyai tugas dan wewenang :
  - a. Membuat/menetapkan dan atau merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ;
  - b. Membentuk dan membubarkan pengurus dan atau memberhentikan/mengangkat seseorang atau beberapa anggota baru ;
  - c. Menetapkan program kerja dan Anggaran Belanja tahunan ;
  - d. Mengesahkan pertanggung jawaban pengurus ;
  - e. Menetapkan jenis dan besarnya iuran anggota ;



- f. Menetapkan jenis pelanggaran dan sanksi-sanksi terhadap anggota yang tidak mematuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan Rapat Anggota ;
- g. Menetapkan dan menunjuk Tim Verifikasi (Pemeriksa Keuangan) yang mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan organisasi.

#### Pasal 4

- (1) Keputusan Rapat Anggota didasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila keputusan Rapat Anggota tidak dapat dicapai sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara dan dianggap sah apabila disetujui oleh  $\frac{1}{2}$  (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota yang hadir.
- (3) Keputusan Rapat Anggota yang menyangkut perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan atau pembubaran organisasi harus disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.

#### Pasal 5

- (1) Apabila para anggota mempunyai tempat tinggal tersebar di beberapa Desa yang lokasinya berjauhan satu sama lain atau karena para anggota mempunyai kesibukan di luar usaha tani dan lain sebagainya, Rapat Anggota dapat diselenggarakan melalui sistem perwakilan.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat menguasai kepada anggota lain untuk mewakilinya dalam Rapat Anggota.
- (3) Setiap peserta yang hadir dalam Rapat Anggota dapat mewakili ..... anggota lainnya.
- (4) Setiap peserta Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini harus mendapatkan mandat tertulis dari para anggota yang diwakilinya dan mendaftarkan nama-nama anggota yang diwakilinya dalam buku daftar hadir.

## Pasal 6

pelaksanaan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak berlaku bagi Rapat Anggota yang membahas dan menetapkan keputusan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta pembubaran organisasi.

## BAB II KEPENGURUSAN

### Pasal 7

- (1) Pengurus P3A ..... dipilih dari dan untuk anggota P3A ..... dengan masa jabatan selama 3 ( tiga ) tahun.
- (2) Anggota pengurus yang berakhir masa jabatannya, dipilih kembali sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali secara berturut, sepanjang yang bersangkutan bersedia dan mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya secara baik.

### Pasal 8

Kedudukan sebagai seorang pengurus berakhir karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Habis masa jabatannya ;
- c. Berhenti atas permintaan sendiri ;
- d. Diberhentikan atas keputusan Rapat Anggota ;
- e. Tidak lagi memenuhi persyaratan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Anggaran Dasar.

### Pasal 9

- (1) Pengurus berhak memperoleh imbalan jasa sesuai hasil rapat anggota sebesar-besarnya 40 % (empat puluh prosen) dari jumlah iuran anggota yang diperoleh dan penghasilan lainnya yang sah.
- (2) Imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing anggota pengurus, diatur sebagai berikut :



- a. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara sebesar-besarnya 20 % (dua puluh prosen) dari jumlah iuran yang diperoleh dan penghasilan lainnya yang sah ;
- b. Pelaksana teknis/Ulu-ulu dan Ketua-ketua Blok/Kwartir sebesar-besarnya 20 % ( dua puluh prosen ) dari jumlah iuran yang diperoleh dan penghasilan lainnya yang sah.

## Pasal 10

- (1) Kewajiban Ketua adalah sebagai berikut :
  - a. Melakukan konsolidasi dengan Kepala Desa dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan penyelenggaraan Rapat Anggota ;
  - b. Menjelaskan Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga pada Rapat Anggota ;
  - c. Menyampaikan Peraturan yang ada hubungannya dengan P3A yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kepada seluruh anggota ;
  - d. Menyampaikan keputusan rapat anggota kepada pejabat yang berwenang ;
  - e. Mewakili pengurus di dalam dan diluar pengadil-an ;
  - f. Melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Rapat Anggota ;
  - g. Dalam hal terjadi tuntutan hukum, Ketua wajib melapor kepada Pembina ;
  - h. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan program kerja dan keuangan pada setiap akhir tahun anggaran ;
  - i. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban ;
  - j. Memimpin, membina, membimbing, mengawasi dan mengendalikan kegiatan pengurus sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masingnya.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Ketua bertanggungjawab kepada Rapat Anggota.

## Pasal 11

- (1) Kewajiban Wakil Ketua adalah sebagai berikut :
  - a. Mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan/ tidak dapat melaksanakan tugas ;
  - b. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas ;
  - c. Membimbing dan mengawasi para pelaksana teknis/Ulu-ulu dan Ketua-Ketua Petak/Blok kwar ter serta para anggota di wilayah kerja dari Desa dimana mereka berdomisili.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Wakil Ketua bertanggung jawab kepada Ketua.

## Pasal 12

- (1) Kewajiban Sekretaris adalah sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan pengurusan administrasi/sekretariat ;
  - b. Melaksanakan inventarisasi para anggota pengurus dan para anggota ;
  - c. Melaksanakan inventarisasi kekayaan organisasi ;
  - d. Menyusun dan membacakan notulen Rapat Anggota dan rapat pengurus ;
  - e. Menyusun laporan pertanggung jawaban kesekretariatan.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua.

## Pasal 13

- (1) Kewajiban Bendahara adalah sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan penghimpinan dan penerimaan uang organisasi ;
  - b. Menyimpan dan mengeluarkan uang organisasi untuk membiayai pelaksanaan program kerja yang telah disetujui Rapat Anggota;
  - c. Melaksanakan pengurusan administrasi keuangan;
  - d. Menyusun rencana kerja dan biaya tahunan ;
  - e. Menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan.



- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Bendahara bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 14

- (1) Kewajiban Pelaksana Teknis/Ulu-ulu adalah sebagai berikut :
- a. Menerima air irigasi dari petugas pengairan melalui pintu tersier ;
  - b. Mengatur, membagi dan mengawasi penyaluran air irigasi ke setiap saluran sesuai dengan jadwal pemberian air irigasi, pola tanam dan jadwal tanam ;
  - c. Membuat rencana dan mengusulkan kebutuhan air irigasi untuk seluruh lahan pada setiap periode pembagian air kepada petugas pengairan ;
  - d. Membantu memberikan masukan dalam perencanaan, persiapan dan pelaksanaan perbaikan serta penyempurnaan saluran-saluran pembawa dan pembuang beserta bangunan-bangunan pelengkapanya ;
  - e. Mengarahkan tenaga petani anggota dalam menanggulangi kerusakan berat jaringan irigasi akibat bencana alam yang memerlukan pengerahan tenaga secara masal ;
  - f. Membimbing dan mengawasi pemeliharaan saluran-saluran pembawa dan pembuang beserta bangunan-bangunannya agar tetap berfungsi dengan baik ;
  - g. Mengusahakan tersedianya peta-peta irigasi lengkap dengan batas blok serta batas pemilihan tanah masing-masing anggota ;
  - h. Menyusun rencana kerja dan biaya operasi dan pemeliharaan jaringan tersier ;
  - i. Menyusun laporan pertanggung jawaban tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Pelaksana Teknis/Ulu-ulu bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua yang bersangkutan.

- (1) Kewajiban Ketua Petak/Blok Kwartar adalah sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan pemberian air irigasi kepada anggotanya secara adil dan merata ;
  - b. Tersedianya peta petak/blok kwarter yang menjadi tanggung jawab, lengkap dengan batas-batas pemilikan tanah ;
  - c. Pembuatan daftar anggota pemilikan dan atau petani penggarap lengkap dengan luas lahannya ;
  - d. Pemeriksaan secara teratur saluran dan bangunan pembagi ter masuk saluran pembuang untuk mencegah pengambilan air secara tidak resmi dan mempertahankan kapasitas/daya muat saluran serta mempertahankan kelestarian prasarana irigasi ;
  - e. Pengamanan saluran pembawa/dan pembuang terhadap pelanggaran anggotanya, gangguan hewan/binatang yang bersifat merusak, mencegah pertumbuhan tanaman liar dalam saluran pembawa dan pembuang serta membantu usaha pemberantasan hama dan penyakit tanaman ;
  - f. Mengkoordinasi kegiatan gotong royong para anggota dalam pemeliharaan prasarana irigasi ;
  - g. Pembuatan laporan mengenai kemajuan pelaksanaan pembagian air, pola dan jadwal tanam, pemeliharaan, perbaikan dan peningkatan prasarana irigasi di wilayah kerjanya ;
  - h. Mengajukan rencana perbaikan dan penyempurnaan fungsi jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya untuk meningkatkan daya guna jaringan irigasi tersebut ;
  - i. Menagih dan memungut iuran anggota untuk diserahkan kepada pengurus ;
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Ketua Petak / Blok Kwartar bertanggung jawab kepada Pelaksana Teknis/Ulu-ulu.



### BAB III KEANGGOTAAN

#### Pasal 16

Setiap anggota mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Mendapatkan pelayanan air irigasi sesuai dengan hak dan ketentuan yang ditetapkan oleh organisasi dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Memilih dan dipilih menjadi anggota pengurus ;
- c. Menyatakan pendapat dalam rapat anggota ;
- d. Melakukan pengawasan terhadap jalannya organisasi dan kebijaksanaan pengurus melalui rapat anggota.

#### Pasal 17

Setiap anggota mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Memenuhi segala peraturan organisasi dan Peraturan perundang-undangan ;
- b. Membayar iuran anggota dan dana-dana lain yang diputuskan oleh rapat anggota ;
- c. Membayar iuran pelayanan irigasi (IPAIR) ;
- d. Melaksanakan dan mentaati sanksi-sanksi yang diputuskan rapat anggota, karena melanggar peraturan yang telah ditetapkan ;
- e. Menerima dan mentaati sistem pembagian air yang telah ditetapkan organisasi dan Peraturan Perundang-undangan ;
- f. Hadir dan aktif dalam rapat anggota ;
- g. Melaporkan kepada pengurus apabila terjadi pemin-  
dahan/pelimpahan garapan tanahnya kepada orang  
lain ;

#### Pasal 18

Keanggotaan organisasi berakhir :

- a. Apabila tidak memenuhi lagi persyaratan seperti yang termuat dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ;
- b. Meninggal dunia ;
- c. P3A .....ini bubar.

## BAB IV KEUANGAN

### Bagian Pertama Sumber Keuangan

#### Pasal 19

Sumber keuangan P3A ..... terdiri dari :

- a. Iuran Anggota ;
- b. Sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat ;
- c. Usaha-usaha lain yang sah.

### Bagian Kedua Kekayaan

#### Pasal 20

- (1) P3A ..... dapat memiliki kekayaan berupa barang tidak bergerak dan barang bergerak baik berasal dari sumbangan maupun atas usaha organisasi sendiri.
- (2) Kekayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus didaftar setiap tahun dalam buku inventaris atau buku kas dan dilaporkan kepada anggota dalam Rapat Anggota.
- (3) Pemindah tanganan/penjualan kekayaan/asset organisasi harus dengan keputusan Rapat Anggota.

### Bagian Ketiga Jenis dan Bentuk Iuran

#### Pasal 21

- (1) Jenis iuran P3A ..... yang dipungut dari anggota terdiri atas :
  - a. Iuran Pokok ;
  - b. Iuran Wajib ;
  - c. Iuran Khusus.
- (2) Bentuk iuran dapat dibayar baik berupa uang maupun barang/inatura.



Bagian Keempat  
Iuran Pokok

Pasal 22

- (1) Iuran pokok sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf a ditetapkan pada Rapat Anggota sebesar Rp ..... /hektar atau ..... kg hasil produksi/hektar dan dibayar sekaligus, atau diangsur dalam jangka waktu ..... bulan.
- (2) Iuran pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan modal tetap yang akan dikembalikan kepada anggota apabila keanggotaannya berakhir.
- (3) Iuran pokok disimpan di BKPD atau Bank Pemerintah lainnya yang terdapat/terdekat di Desa wilayah kerja perkumpulan.
- (4) Iuran pokok dapat dipergunakan untuk pembangunan, rehabilitasi dan pengembangan jaringan irigasi yang sifatnya sementara dan harus dikembalikan sebagai modal tetap pada saat iuran wajib dan iuran khusus ataupun bantuan lainnya sudah terkumpul.

Pasal 23

- (1) Iuran pokok sebagaimana dimaksud Pasal 22 sewaktu-waktu dapat dipinjamkan kepada anggota yang memerlukan dan harus dilunasi pada musim panen beserta bunganya.
- (2) Bunga hasil pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan sumber pendapatan organisasi.

Bagian Kelima  
Iuran Wajib

Pasal 24

- (1) Besarnya iuran wajib sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf b ditetapkan dalam Rapat Anggota terdiri dari :
  - a. Berupa uang sebesar Rp..... /hektar/musim ; dan atau

- b. Dalam bentuk gabah kering giling.....  
kg/hektar/musim.
- (2) Iuran wajib dipergunakan untuk :
- a. Imbalan Jasa Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara sebesar-besarnya 20 % ;
  - b. Imbalan Jasa Ulu-ulu dan Ketua Blok sebesar-besarnya 20 % ;
  - c. Membiayai kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi 40 % ;
  - d. Biaya admistrasi sebesar 10 % ;
  - e. Tambahan/cadangan modal sebesar 10.

#### Pasal 25

Apabila terjadi kegagalan panen yang telah disahkan oleh pengurus maka iuran wajib sebagaimana dimaksud Pasal 24 dapat dikurangi atas dasar prosentase kerusakan atau dibebaskan sama sekali.

#### Bagian Keenam Iuran Khusus

#### Pasal 26

- (1) Iuran khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, jenis dan besarnya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan berda sarkan keputusan Rapat Anggota.
- (2) Iuran khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini digunakan untuk nmelaksanakan rehabilitasi, pembangunan jaringan irigasi dan pinjaman kepada anggota atas dasar musyawarah.

#### Bagian Ketujuh Pemeriksaan Keuangan dan Kekayaan

#### Pasal 27

Laporan keuangan dam kekayaan perkumpulan setiap tahun dibuat oleh pengurus dan dipertanggung jawabkan



kepada Rapat Anggota yang dibentuk dan susunannya diatur sebagai berikut :

- a. Penerimaan ;
- b. Pengeluaran yang disesuaikan dengan Anggaran Belanja dan Program Kerja ;
- c. Bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran ;
- d. Kekayaan perkumpulan (inventaris kekayaan) .

#### Pasal 28

- (1) Pemeriksaan keuangan dan kekayaan organisasi dilaksanakan oleh Tim Verivikasi (pemeriksa keuangan) yang diangkat dari anggota oleh Rapat Anggota.
- (2) Anggota pengurus tidak dapat ditunjuk sebagai Tim Verivikasi.
- (3) Apabila diperlukan, Rapat Anggota dapat membentuk dan mengangkat Tim Verivikasi Ahli dari pihak lain yang bersifat fungsional.

#### Pasal 29

- (1) Susunan keanggotaan Tim Verivikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri dari :
  - a. Seorang Ketua merangkap anggota ;
  - b. 2 (dua) orang Anggota.
- (2) Tim Verivikasi mempunyai kewajiban melaksanakan pemeriksaan keuangan dan kekayaan organisasi setiap tahun dan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini selama-lamanya 1 (satu) bulan setelah Rapat Anggota Tahunan.

### BAB V ANGGARAN BELANJA

#### Pasal 31

- (1) Setiap tahun pengurus menyusun anggaran belanja tahunan untuk dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Anggota.

- (2) Anggaran belanja P3A setiap tahun dimulai dari tanggal 1 April dan berakhir tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

## BAB VI PEMBINAAN

### Pasal 31

- (1) Pengurus bertanggung jawab atas pelaksanaan upaya pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini secara teratur dan terus menerus, antara lain dalam bentuk pertemuan 2 (dua) mingguan, kunjungan kerja lapangan, anjang sono, kursus, widia wisata, lomba karya antar blok/petak kwarter setiap tahun sekali dan pemberian penghargaan.

## BAB VII PELANGGARAN DAN SANKSI-SANKSI

### Pasal 32

- (1) Penyiapan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 17 Anggaran Rumah Tangga ini merupakan pelanggaran.
- (2) Setiap pelanggaran dikenakan sanksi.

### Pasal 33

Bentuk-bentuk pelanggaran yang dikenakan sanksi adalah sebagai berikut :

- a. Bagi anggota yang menunggak membayar iuran wajib dikenakan denda ..... % tiap bulan kelambatan dari jumlah sisa iuran.
- b. Pengambilan air tidak sah dikenakan sanksi tidak diberi air pada giliran berikutnya atau berupa padi.....kg atau gengan uang sebesar Rp .....



- c. Pengrusakan jaringan, dikenakan sanksi memperbaiki kembali seper ti keadaan semula atas biaya yang bersangkutan, atau apabila yang bersangkutan tidak melaksanakannya pada batas waktu yang diperlukan, perbaikan dilaksanakan oleh pengurus atas biaya sipelanggar.
- d. Pengrusakan jaringan karena hewan, maka sanksi perbaikannya dikenakan pada pemilik hewan atau kuasanya.

#### Pasal 34

Pelaksanaan penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan oleh Pelaksana Teknis Ulu-ulu dibantu oleh Ketua Petak/Blok.

#### Pasal 35

Anggota maupun pengurus yang nmenolak atau tidak mengindahkan atas sanksi terhadap suatu pelanggaran, dikenakan sanksi tidak diberi air selama 1 (satu) musim tanam atau selama-lamanya 2 (dua) musim tanam.

#### Pasal 36

- (1) Pengurus yang menyalah gunakan hasil iuran anggota untuk kepentingan pribadi/golongan, diwajibkan mengembalikan dana yang disalah gunakan selambat-lambatnya pada musim panen berikutnya dan diberhentikan dari kepengurusan.
- (2) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak dipenuhi, maka pengurus yang menyalah gunakan hasil iuran dan kekayaan organisasi dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib sebagai tindakan kejahatan/korupsi dan dilaksanakan tuntutan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### BAB VIII PEMBUBARAN

- (1) Organisasi P3A ..... dapat dibubarkan apabila seluruh atau sebagian terbesar wilayah kerja P3A ..... sudah berubah fungsi menjadi daerah perkotaan, industri, perumahan dan perubahan lainnya diluar usaha pertanian.
- (2) Pembubaran organisasi P3A ..... dilaksanakan dengan keputusan Rapat Anggota sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga ini.
- (3) Kekayaan/asset dan hutang piutang organisasi akan diatur sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku.

BAB IX  
PENUTUP

- (1) Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditentukan oleh Rapat Anggota dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai mana dimaksud dalam Bab I Anggaran Rumah Tangga ini,
- (2) Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

....., ..... 19.....

Ketua,

.....

Sekretaris,

.....



MENGETAHUI/MENYETUJUI :

Kepala Desa/Kelurahan :

1. Kepala Desa/Kelurahan .....
- .....
2. Kepala Desa/Kelurahan .....
- .....
3. Dst.
- Camat .....
- .....

DISAHKAN OLEH :  
Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
Hulu Sungai Selatan,

.....

Dengan Surat Keputusan Nomor ..... Tanggal .....  
tentang.....